

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*) adalah pasar modal di Indonesia, yang merupakan gabungan dari dua bursa efek yakni, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penggabungan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi daya saing di kawasan regional (sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Darmawi, 2011:1).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi, sehingga bank harus mengelolanya dengan baik dan *prudential* serta dituntut untuk transparansi dalam penyampaian laporan keuangan. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*” (KNKG, 2004).

Semakin kompleksnya resiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* oleh perbankan, pelaksanaan *Good Corporate Governance* ditujukan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap

perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank Indonesia mengagaskan peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum di peraturan bank Indonesia No.8/4/PBI/2006.

Pada dasarnya klasifikasi bank di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya, seperti kliring dan inkaso.

Pemilihan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut dapat peneliti peroleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di website Bursa Efek Indonesia.

Terdapat 36 perusahaan perbankan yang ada di Indonesia dan telah listing di Bursa Efek Indonesia. Adapun list dari emiten tersebut, yaitu:

Daftar bank yang terdaftar:

1. (AGRO) Bank Agroniaga Tbk
2. (BABP) Bank ICB Bumi Putra Tbk
3. (BACA) Bank Capital Indonesia Tbk
4. (BAEK) Bank Ekonomi Raharja Tbk
5. (BBCA) Bank Central Asia Tbk
6. (BBKP) Bank Bukopin Tbk
7. (BBMD) Bank Mestika Dharma Tbk
8. (BBNI) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
9. (BBNP) Bank Nusantara Parahyangan Tbk
10. (BBRI) Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11. (BBTN) Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
12. (BCIC) Bank Mutiara Tbk
13. (BDMN) Bank Danamon Indonesia Tbk
14. (BEKS) Bank Pundi Indonesia Tbk

15. (BJBR) Bank Jabar Banten Tbk
16. (BJTM) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
17. (BKSW) Bank Kesawan Tbk
18. (BMAS) Bank Maspion Indonesia Tbk
19. (BMRI) Bank Mandiri (Persero) Tbk
20. (BNBA) Bank Bumi Arta Tbk
21. (BNGA) Bank CIMB Niaga Tbk
22. (BNII) Bank International Indonesia Tbk
23. (BNLI) Bank Permata Tbk
24. (BSIM) Bank Sinar Mas Tbk
25. (BSWD) Bank Swadesi Tbk
26. (BTPN) Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
27. (BVIC) Bank Victoria International Tbk
28. (INPC) Bank Artha Graha International Tbk
29. (MAYA) Bank Mayapada International Tbk
30. (MCOR) Bank Windu Kentjana International Tbk
31. (MEGA) Bank Mega Tbk
32. (NAGA) Bank Mitraniaga Tbk
33. (NISP) Bank NISP OCBC Tbk
34. (NOBU) Bank Nationalnobi Tbk
35. (PNBN) Bank Pan Indonesia Tbk
36. (SDRA) Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Setiap perusahaan baik yang *go public* maupun yang tidak *go public* pasti mempunyai tujuan dalam bisnisnya. Tujuan utama perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan dengan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham (Senda, 2013). Nilai perusahaan sangat penting karena tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, jika perusahaan berjalan dengan baik, maka nilai perusahaan akan meningkat (Weston dan Copeland dalam Pertiwi dan Pratama, 2012).

Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2002:6).

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah *go public* agar tujuan perusahaan dapat dicapai, banyak *shareholder* menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer perusahaan.

Meningkatnya nilai suatu perusahaan tentunya akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Sebagai imbalan bagi investor yang telah menanamkan modalnya bagi perusahaan, maka perusahaan memberikan pembayaran dividen kepada mereka laba besar maka besar pula pembayaran dividen yang diterima oleh investor. Jika perusahaan berjalan lancar maka harga saham perusahaan akan meningkat. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya. Harga saham merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila investor ingin memiliki suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi semakin tinggi nilai suatu perusahaan semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan (Kodir, 2013).

Namun, seringkali pihak manajer perusahaan mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut, sehingga timbul konflik antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi ini biasanya disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*) dimana manajer berfungsi sebagai *agent* dan *shareholder* sebagai *principal*. Teori keagenan terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Retno, 2012).

Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Hal tersebut merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi

nilai perusahaan. Masalah *Corporate Governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada Teori Agensi (*Agency Theory*) yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan (Pertiwi dan Pratama, 2012).

Penerapan GCG sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga kepercayaan yang operasionalnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip prinsip GCG dengan baik. Penerapan GCG di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat, sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil. Untuk itu, Good Corporate Governance pada sektor perbankan sangat penting sekali diterapkan. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, secara prinsip juga mengatur aspek GCG, seperti *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* (Besari, 2009)

Menurut BPKP, implementasi dari *Good Corporate Governance* diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan. *Good Corporate Governance* diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh (Retno, 2012).

Beberapa konsep tentang *Corporate Governance* (CG) antara lain yang dikemukakan oleh (Shleifer dan Vishny dalam Gozali, 2012) yang menyatakan *Corporate Governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. *Corporate Governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return*. Selain itu *Corporate*

*Governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (atau *insider*) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (Gozali, 2012).

Pamungkas (2012), sistem *Corporate Governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme *internal governance* seperti proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, kompensasi eksekutif dan mekanisme *eksternal governance* seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing*. Terdapat beberapa mekanisme *Corporate Governance* sebagai sarana monitoring untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan di antara *prinsipal* dan *agent (agency conflict)*. Siswantaya (2007) mengemukakan penerapan mekanisme *Corporate Governance* dapat dilakukan melalui mekanisme monitoring untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yaitu:

1. Memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer (Jensen dan Meckling, dalam Siswantaya 2007).
2. Kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh`d et al dalam Pratana (2002) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar. Selain itu, investor institusional dianggap *sophisticated investors* yang tidak dengan mudah dibodohi oleh tindakan manajer (Bushee dalam Siswantaya 2007).
3. Dewan komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik (Noviawan dan Septiani, 2013).

*International Finance Corporation (IFC) Corporate Governance Project* Indonesia, menuturkan, beberapa keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*, mulai dari memberikan nilai tambah bagi perusahaan tak hanya secara citra, adapula dari sisi keuangan yang akan lebih tertata baik. Keuntungan lain, dengan kondisi perusahaan yang baik sudah tentu pihak luar akan memandang dengan baik. Perusahaan pun akan dengan mudah mendapatkan akses modal jika membutuhkan dari investor lokal maupun luar negeri karena perusahaan mendapatkan kepercayaan dan investor mau

menanamkan uangnya. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menerapkan *good corporate governance*, hal buruk yang bisa diraih. Contohnya, merusak kredibilitas perusahaan dari dalam maupun luar. Kepercayaan investor akan hilang (sumber: liputan6.com).

Dalam mengawasi dan memonitor perilaku manajer, pemegang saham harus bersedia mengeluarkan kos pengawasan yang disebut dengan *agency cost* atau biaya keagenan. Untuk mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial, dengan memberikan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyelaraskan kepentingan dengan pemegang saham. Dengan keterlibatan pemegang saham, manajer akan bertindak secara hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan terhadap kepemilikan saham, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Biaya keagenan juga dapat dikurangi dengan kepemilikan institusional dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional, dengan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajerial (Nuraina, 2012). Adanya pemegang saham besar seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen dengan pengawasan yang lebih optimal (Sheilir dan Vishny dalam Indahningrum dan Handayani, 2009).

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Adanya dewan komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik (Noviawan dan Septiani, 2013). Premis dari teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling dalam Arifin, 2010). Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi

*equity* mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh dalam Arifin 2010). Dengan semakin berfungsinya komisaris independen dalam mengawasi manajer, maka kepercayaan investor akan semakin besar akan kinerja yang akan diperoleh perusahaan.

*Tobin's Q* digunakan oleh Klapper dan Love (2002) dalam Sudiyatno (2010) yang menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. *Tobin's Q* sebagai indikator pengukur nilai perusahaan telah banyak digunakan dalam penelitian keuangan, khususnya penelitian yang mengambil permasalahan nilai perusahaan. *Tobin's Q* adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan yang menunjukkan suatu proforma manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Nilai *Tobin's Q* menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan (Lang, *et al* dalam Sudiyatno, 2010) atau potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin & Brainard dalam Sudiyatno, 2010). Maka *Tobin's Q* dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan.

Pada 24 Juni 2013, Bank Indonesia (BI) menyebutkan empat bank yang tidak menerapkan *Good Corporate Governance*. Bank Indonesia memberikan sanksi kepada empat bank. Keempat bank tersebut adalah PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma. Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, sanksi berupa pembatasan diberikan lantaran keempat bank tersebut tak menerapkan *Good Corporate Governance*. Pemberian sanksi berupa pembatasan tersebut diterapkan berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Dari keempat bank tersebut terdapat bank yang masih dilarang melakukan ekspansi perbankan oleh BI. Permasalahan yang terjadi di empat bank tersebut masuk kategori sebagai risiko operasional. Bahkan dari keempat bank tersebut terdapat permasalahan yang bergulir ke ranah hukum (sumber: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Dari fenomena diatas pada *annual report* PT Bank Mega dan PT Panin Bank yang menyangkut mekanisme *Good Corporate Governance* pada penelitian ini adalah tidak terdaftar adanya kepemilikan manajerial. Jensen dan Meckling dalam



Antonia (2008), mengatakan semakin bertambahnya saham yang dimiliki manajer melalui kepemilikan manajerial akan memotivasi kinerja manajemen karena mereka merasa memiliki andil dalam perusahaan baik itu dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil karena ikut sebagai pemegang saham perusahaan sehingga kinerja manajemen semakin baik dan berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya, semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham (Retno, 2012), semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan (Imanta, 2011). Dilihat dari nilai perusahaan pada *historical price* di [www.finance.yahoo.co.id](http://www.finance.yahoo.co.id), harga saham Bank Mega semakin naik dari awal tahun 2013 namun pada pertengahan bulan juni harga saham semakin menurun, begitu pula dengan harga saham Panin Bank pada awal tahun 2013 mulai naik dan turun pada pertengahan bulan Juni 2013, Bank Jabar Banten juga mengalami penurunan harga saham pada juni 2013, dan terakhir adalah Bank Mestika Dharma, penulis tidak menemukan *historical* harga saham bank ini pada tahun tersebut. ini tidak sesuai dengan teori diatas yang mengatakan bahwa makin tinggi harga saham maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham.

Salah satu kasus yang tata kelola nya lemah adalah Citibank yang terjadi pada Maret 2011, kasus terkait dugaan penggelapan dana nasabah sekitar Rp17 miliar oleh mantan *Relationship Manager* Citibank yaitu Melinda Dee. Dia diduga mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap slip transfer penarikan dana pada beberapa rekening nasabahnya (sumber: [www.fokus.news.viva.co.id](http://www.fokus.news.viva.co.id)). Deputi Bidang Pengawasan Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan: saat ini kelemahannya ada pada sistem pengawasan internal bank itu sendiri sehingga memungkinkan kolusi antar pegawai untuk memuluskan niat jahat dengan menggasak dana nasabah, kelemahan yang memang disadari pertama adalah internal proses bank itu sendiri. Dari hasil pengawasan dan pengamatan, tercatat tidak optimalnya supervisi atasan, adanya kolusi antar pegawai, maupun nasabah yang cepat percaya terhadap pegawai bank sehingga merugikan nasabah (sumber: [www.jppn.com](http://www.jppn.com)). Tak heran harga sahamnya roboh menjadi hanya US\$ 1 dollar terjun bebas dari harga US\$ 50, artinya para pemegang saham Citibank telah

kehilangan uangnya hingga 98% (sumber: [www.strategimanajemen.net](http://www.strategimanajemen.net)). Dalam *annual report* Citybank tahun 2011, penulis tidak menemukan adanya struktur dewan komisaris independen dan tidak adanya kepemilikan manajerial karena bank merupakan cabang dari dan dimiliki sepenuhnya oleh Citigroup. Inc – New York.

Dari fenomena tersebut terlihat adanya tindakan sengaja yang dilakukan. Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, mengatakan *fraud* terjadi karena lemahnya penerapan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* bank tersebut (sumber: [www.keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id)). Fenomena diatas menunjukkan bahwa isu utama dari permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan persoalan moral dan etika yang kurang baik, governance yang buruk, tidak optimalnya sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, peran dari corporate governance tidak bisa diabaikan oleh suatu perusahaan. Negara-negara di dunia dituntut untuk menerapkan sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis, yaitu kegiatan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustendi dan Jimmy (2008), yang menemukan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sedangkan penelitian lain Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011), menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif, karena kepemilikan manajerial merupakan mekanisme yang efektif untuk mengatasi konflik keagenan yang terjadi akibat kepentingan manajer dan pemilik. Adanya kepentingan manajemen untuk mengelola perusahaan secara efisien guna meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai pasar saham secara kuantitas akan memberikan keuntungan *capital gain* bagi manajer, sehingga manajer mendapatkan dua sumber pendapatan sekaligus yaitu gaji dan *capital gain*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukirni (2012), pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak

sebagai pencegahan terhadap pemborosan dan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sofyaningsih dan hardiningsih (2011), Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh karena jumlah pemegang saham yang besar tidak efektif dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan, karena adanya asimetri informasi antara investor dengan manajer, investor belum sepenuhnya memiliki informasi yang dimiliki oleh manajer (sebagai pengelola perusahaan) sehingga manajer sulit dikendalikan oleh investor institusional. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Rupilu (2011), Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka sebagai mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan laba memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rupilu (2011), menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh mekanisme dewan komisaris independen tidak efektif dalam memberikan pengawasan terhadap manajemen sehingga terjadi penurunan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2008), dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena dewan komisaris independen dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajemen untuk melakukan *earnings* manajemen, memperkuat hubungan *earning* manajemen dan nilai perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen maka akan mengurangi tindakan manipulasi.

Melihat hasil penelitian yang masih beragam serta pentingnya keberadaan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen dalam sebuah perusahaan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada tahun 2009-2013?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada tahun 2009-2013?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada tahun 2009-2013?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q pada tahun 2009-2013?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen) dan Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012.
2. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial Terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada tahun 2008-2012.
3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial Terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada tahun 2008-2012.

4. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial Terhadap Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q pada tahun 2008-2012.
5. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q pada tahun 2008-2012.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi peneliti

Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen) Terhadap Nilai Perusahaan khususnya sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi pihak akademis

Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi perusahaan

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat kepada perusahaan dalam mengimplimentasikan *Good Corporate Governance* terhadap perubahan harga.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang melakukan praktik GCG.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKAN DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian berisi tentang rangkuman teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian yang digunakan, tahap penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini dan saran yang akan diberikan.